

SKRIPSI

**EVALUASI IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION*
SYSTEM BERDASARKAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK
MENURUT ADAM SMITH**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : NI PUTU MIRA SWANDEWI
NIM : 2115654036

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

EVALUASI IMPLEMENTASI *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* BERDASARKAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT ADAM SMITH

Ni Putu Mira Swandewi
2115654036

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Di era revolusi digital, transformasi teknologi telah mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan global. Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak, meluncurkan *Core Tax Administration System* (CTAS) sebagai upaya reformasi perpajakan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Namun, implementasi CTAS yang dimulai pada 1 Januari 2025 menuai beragam respons, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip pemungutan pajak klasik menurut Adam Smith. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keselarasan implementasi CTAS sebagai sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia dengan prinsip pemungutan pajak *The Four Maxims* (keadilan, kepastian, kenyamanan, dan efisiensi) yang dikemukakan oleh Adam Smith. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif, melibatkan wawancara mendalam terhadap empat pegawai konsultan pajak dan dua akademisi perpajakan, serta analisis dokumen dan observasi. Data dianalisis melalui teknik *coding* dan *thematic analysis* dengan bantuan *software* NVivo 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CTAS telah memenuhi prinsip *equity* (keadilan) melalui fitur NPWP sementara dan integrasi data lintas instansi, yang memungkinkan distribusi beban pajak lebih proporsional. Prinsip *certainty* (kepastian) tercermin dari sentralisasi layanan dan transparansi penghitungan pajak, sementara *convenience* (kenyamanan) terlihat dari kemudahan akses *real-time* dan fleksibilitas waktu pelaporan. Namun, kompleksitas antarmuka sistem dan kesenjangan literasi digital menjadi tantangan dalam mencapai prinsip *efficiency* (efisiensi), terutama bagi wajib pajak UMKM dan individu yang kurang paham teknologi. Temuan ini diperkuat oleh teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) dan *Technology Readiness* (TR), yang mengungkapkan bahwa adopsi CTAS sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kesiapan teknologi pengguna.

Kata Kunci: *Core Tax Administration System*, Keadilan Pajak, *Technology Readiness*, UTAUT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM BASED ON THE PRINCIPLES OF TAX COLLECTION BY ADAM SMITH

Ni Putu Mira Swandewi
2115654036

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

In the era of digital revolution, technological transformation has driven the modernization of global tax administration systems. Through the Directorate General of Taxes, Indonesia has launched the Core Tax Administration System (CTAS) as a digital-based tax reform initiative to enhance efficiency, transparency, and taxpayer compliance. However, the implementation of CTAS starting January 1, 2025 has elicited mixed responses, particularly regarding its alignment with Adam Smith's classical principles of taxation. This study aims to evaluate the implementation of the CTAS as Indonesia's digital tax administration system in relation to Adam Smith's The Four Maxims principles of taxation (equity, certainty, convenience, and efficiency). The research employs a qualitative approach with an interpretive paradigm, utilizing in-depth interviews with four tax consultant practitioners and two tax academics, along with document analysis and observation. Data were analyzed through coding and thematic analysis techniques using NVivo 15 software. The findings indicate that CTAS has fulfilled the equity principle through temporary tax identification number features and cross-institutional data integration, enabling more proportional distribution of tax burdens. The certainty principle is reflected in service centralization and transparent tax calculations, while convenience is evident through real-time access and reporting time flexibility. However, system interface complexity and digital literacy gaps pose challenges in achieving the efficiency principle, particularly for SME taxpayers and individuals with limited technological proficiency. These findings are reinforced by the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) and Technology Readiness (TR) theories, which reveal that CTAS adoption is significantly influenced by users' perceived benefits, ease of use, and technological readiness.

Keywords: *Core Tax Administration System, Tax Equity, Technology Readiness, UTAUT*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	13
C. Alur Pikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	20
D. Keabsahan Data.....	22
E. Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan dan Temuan	34
BAB V PENUTUP.....	47
A. Simpulan	47
B. Implikasi	48
C. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	22
------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	18
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data	25
Gambar 4.1 Data NVivo <i>Word Frequency Query</i>	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Wawancara.....	58
Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Pegawai Konsultan Pajak	59
Lampiran 3: Pedoman Wawancara dengan Akademisi Perpajakan	60
Lampiran 4: Hasil Wawancara dengan Informan Kak Putu.....	61
Lampiran 5: Hasil Wawancara dengan Kak Wayan Pajak	64
Lampiran 6: Hasil Wawancara dengan Informan Kak Kadek.....	66
Lampiran 7: Hasil Wawancara dengan Informan Kak Komang	68
Lampiran 8: Hasil Wawancara dengan Informan Bapak Ketut	72
Lampiran 9: Hasil Wawancara dengan Informan Bapak Made	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Digitalisasi pajak, sebagai bagian dari revolusi digital, menjadi fokus global karena kemampuannya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan (Chehrehbargh et al., 2024). Dengan memanfaatkan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *cloud computing*, otoritas pajak di berbagai negara berupaya untuk membuat sistem perpajakan lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi digital (Munjeyi dan Schutte, 2024). Modernisasi teknologi ini dipandang sebagai salah satu pilar penting reformasi perpajakan karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan *tax ratio*, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak (Oats dan Tuck, 2019; Yamen et al., 2023). Digitalisasi pajak tidak hanya menjadi tren global, tetapi juga mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan sebagai upaya sistematis menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi.

Reformasi administrasi perpajakan, yang selanjutnya disebut *tax reform*, salah satunya ditandai oleh digitalisasi proses bisnis yang merupakan bagian dari upaya sistematis suatu negara. *Tax reform* didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang dilakukan suatu negara untuk terus menyesuaikan sistem pajak dengan perubahan ekonomi, sosial, dan situasi politik (Cahyadi et al., 2023). Menilik lebih dalam, *tax reform* sejalan dengan serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda global Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* atau disingkat SGD's (Hummel dan Szekely, 2022; Swain dan Yang-Wallentin, 2020). Dalam rancangannya, program ini terdiri atas 17 tujuan yang akan dicapai, salah satunya adalah tujuan ke-8 SDGs yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Reformasi fiskal perlu dilakukan, salah satunya melalui optimalisasi pendapatan (Kemenko Perekonomian, 2023). Penerimaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara menjadi instrumen yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang dimaksud (Al-rahamneh et al., 2023). Salah satu indikator keberhasilan reformasi pajak dalam mendukung SGD's tujuan ke-8 adalah peningkatan *tax ratio*, yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

Dilihat dari definisinya, *tax ratio* bukan hanya menjadi alat pengukur efektivitas perpajakan, namun juga mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara (Yossinomita et al., 2024). Oleh karena itu, sebagai negara berkembang, Indonesia seharusnya memiliki *tax ratio* sebesar 15% dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, kenyataannya diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, posisi *tax ratio* Indonesia per akhir Oktober 2024 hanya mencapai angka 10,02% (Annasa, 2024). Rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan perlunya langkah strategis untuk memperbaiki sistem perpajakan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan dengan menerapkan paradigma administrasi perpajakan modern. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan *Core Tax Administration System* (CTAS) yang dipercaya mampu meningkatkan

tax ratio negara. CTAS bukanlah langkah pertama dalam reformasi perpajakan Indonesia. Sejak tahun 1983, pemerintah telah melakukan berbagai modernisasi sistem, dan CTAS menjadi terbaru yang mengintegrasikan teknologi digital.

CTAS pada prinsipnya merupakan reformasi perpajakan yang mencakup perencanaan, pembinaan, penyebaran, dukungan, dan pemeliharaan (Darmayasa dan Hardika, 2024), dengan *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) menjadi fundamental dalam pembangunan sistem informasinya. Reformasi ini merupakan kelanjutan dari evolusi sistem perpajakan Indonesia yang telah berlangsung sejak lama. Dalam sejarah perpajakan, upaya reformasi perpajakan telah melewati banyak tahap sejak tahun 1983 yang dimulai dengan perubahan paradigma petugas pajak, hingga berlanjut pada tahun 1998 dengan modernisasi administrasi perpajakan (Fitriya, 2024). CTAS diprediksi mampu mempermudah wajib pajak dalam mengelola administrasi kewajiban perpajakannya melalui layanan *omnichannel* dan *borderless* sehingga alur pada satu proses dan data saling terkait (Riaz et al., 2024). Memahami lebih lanjut, untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara *self-assessment*, CTAS menyediakan *Tax Account Management* (TAM). Melalui *TPPORTAL*, TAM dapat diakses kapan saja dan menampilkan data secara *real time* yang mencakup profil WP, hak dan kewajiban perpajakan, buku besar perpajakan, dan riwayat transaksi perpajakan (Sabastian, 2024). Transformasi ini sejalan dengan rekomendasi *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan harus bertransformasi dan berubah secara

terus menerus sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpajakan (OECD, 2024). Meskipun CTAS menawarkan kemudahan, implementasinya tidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal adopsi oleh wajib pajak dan peran konsultan pajak sebagai penghubung.

Konsultan pajak memiliki peran dalam membantu mengelola administrasi pajak secara terintegrasi dengan CTAS sebagai penghubung otoritas pajak dengan wajib pajak sehingga mereka harus menguasai implementasi CTAS (Pavlova dan Knyazeva, 2022). Namun, sebagai sistem baru, CTAS kerap menimbulkan keraguan di kalangan wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami manfaatnya. Potensi CTAS untuk meningkatkan penerimaan pajak justru menjadi polemik tentang penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai CTAS mungkin belum cukup masif bahkan di kalangan konsultan pajak sehingga dapat berpengaruh dalam memaksimalkan pemungutan pajaknya. Ketidakpastian ini berpotensi bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith yang dikenal dengan istilah “*The Four Maxims*”, terutama prinsip kenyamanan (*convenience*) dan keadilan (*equity*), sehingga perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pandangan awal di tempat praktik kerja lapangan yakni pada kantor konsultan pajak, peneliti berpandangan bahwa wajib pajak cenderung dalam kondisi bingung dengan perubahan sistem yang mengadopsi sebagian besar pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

diakses melalui CTAS. Berdasarkan hal tersebut, implementasi CTAS sangat menarik untuk diteliti.

B. Rumusan Masalah

Mencermati lebih dalam pemaparan latar belakang terkait implementasi *Core Tax Administration System* (CTAS) berdasarkan asas pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah “*The Four Maxims*” oleh Adam Smith sehingga muncul banyak persepsi dari wajib pajak. Kesesuaian CTAS yang telah diterapkan dalam aktivitas perpajakan sebagai bentuk dari reformasi perpajakan dengan asas-asas dalam pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih dalam. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mempertanyakan bagaimana keselarasan antara implementasi *Core Tax Administration System* dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak dalam “*The Four Maxims*” yang ditulis oleh Adam Smith?

C. Batasan Masalah

Melalui uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, sebagai upaya memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti sehingga peneliti lebih menekankan pada penyimpangan dari pokok permasalahan yang diteliti. Peneliti membatasi konteks ruang terkait dengan pandangan pegawai konsultan pajak dalam melayani jasa konsultasi perpajakan setelah diterapkannya CTAS, serta terbatas dalam konteks waktu yaitu saat diberlakukannya CTAS sejak tanggal 1 Januari 2025.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menimbang urgensi penelitian pada bagian rumusan masalah yang telah sebelumnya dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini untuk menilai keselarasan penggunaan CTAS pasca diterapkannya sebagai sistem administrasi perpajakan dengan harapan mampu menciptakan keselarasan antara seluruh pihak yang terkait.

2. Manfaat Penelitian

Menindaklanjuti tujuan penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

a. Manfaat Teoretis

Pembaharuan sistem administrasi perpajakan sebagai bentuk reformasi pajak dalam bentuk CTAS tentu diperlukan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat membantu pihak-pihak terkait seperti wajib pajak untuk mempersiapkan diri dan mengantisipasi dampak yang muncul akibat pembaharuan sistem administrasi perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Otoritas pajak memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pada sektor perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi alternatif serta pertimbangan dalam memaksimalkan portal *Core Tax Administration System* (CTAS).

Melihat respons wajib pajak dalam menggunakan CTAS dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan *tax ratio* Indonesia.

2) Bagi Wajib Pajak

DJP menjadikan wajib pajak sebagai sasaran utama CTAS. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pandangan baru kepada wajib pajak terkait implementasi CTAS.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali (PNB) sebagai lembaga pendidikan vokasi dapat membantu mengedukasi masyarakat khususnya mahasiswa PNB melalui pengembangan mata kuliah berbasis temuan penelitian ini. Hasil penelitian mengenai evaluasi *Core Tax Administration System* berdasarkan prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith dapat diintegrasikan dalam kurikulum, khususnya untuk program studi terkait administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan dengan permasalahan sejenis sekaligus memperkaya literatur pendidikan vokasi di bidang perpajakan.

4) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai peneliti diharapkan terus mengembangkan penelitian lanjutan dengan tema yang serupa dan diharapkan dapat

memberikan informasi yang berguna untuk memperluas pemahaman tentang implementasi CTAS.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

CTAS telah membawa transformasi signifikan dalam administrasi perpajakan Indonesia. Sistem ini dinilai mampu meningkatkan keadilan (*equity*) melalui fitur seperti NPWP sementara dan integrasi data lintas instansi yang memungkinkan distribusi beban pajak secara lebih proporsional sesuai kemampuan ekonomi wajib pajak. Namun, kompleksitas sistem dan kesenjangan literasi digital menjadi tantangan, terutama bagi UMKM dan wajib pajak individu yang kurang literasi digital. Meskipun CTAS memenuhi prinsip *certainty* dan *convenience* dengan sentralisasi layanan serta kemudahan akses *realtime*, aspek *efficiency* masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan antarmuka dan pelatihan yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, CTAS telah selaras dengan prinsip Adam Smith dalam hal transparansi dan integrasi data, tetapi perlu penyempurnaan untuk memastikan keadilan dan kemudahan bagi seluruh lapisan wajib pajak. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa penerimaan CTAS oleh wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor *technology readiness* dan *performance expectancy* menurut teori UTAUT. Wajib pajak yang memiliki *optimism* dan *innovativeness* tinggi cenderung lebih mudah beradaptasi, sementara kelompok *discomfort* dan *insecurity* menghadapi kesulitan dalam penggunaan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan CTAS tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan psikologis dan sosial pengguna. Dengan demikian, meskipun CTAS merupakan

langkah maju dalam modernisasi perpajakan, efektivitasnya sangat ditentukan oleh upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui sosialisasi yang lebih masif dan pendampingan teknis.

B. Implikasi

Implikasi praktis dari penelitian ini terbagi menjadi tiga pihak, yaitu otoritas pajak, wajib pajak, serta konsultan pajak. Implikasi praktis bagi otoritas pajak yakni perlunya otoritas pajak untuk memperkuat infrastruktur pendukung CTAS, terutama dalam hal keamanan siber dan edukasi wajib pajak. Sosialisasi berbasis media sosial dan pelatihan literasi digital bagi UMKM menjadi hal yang krusial untuk memastikan inklusivitas sistem. Selain itu, penyederhanaan antarmuka pengguna dan pengembangan fitur bantuan (*helpdesk*) yang responsif dapat mengurangi *discomfort* pengguna. Implikasi kebijakan lainnya adalah perlunya evaluasi berkala terhadap tarif dan mekanisme penghitungan pajak dalam CTAS untuk memastikan prinsip *ability to pay* benar-benar terimplementasi, sehingga keadilan vertikal dan horizontal tercapai.

Sementara itu, secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan prinsip klasik Adam Smith yakni *The Four Maxims* dengan model penerimaan teknologi modern seperti UTAUT dan *Technology Readiness*. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, seperti analisis dampak CTAS terhadap *tax ratio* atau studi komparatif dengan sistem serupa di negara lain. Implikasi akademis lainnya adalah perlunya pengembangan model evaluasi sistem perpajakan digital yang menggabungkan

aspek keadilan, kepatuhan, dan kesiapan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi kebijakan, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan teori dalam bidang administrasi perpajakan digital.

C. Saran

Penelitian ini diakhiri dengan memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai bahan pertimbangan dengan harapan dapat memberikan sumbangsih serta kolaborasi positif di masa mendatang. Berdasarkan tujuan akhir penelitian, peneliti dapat memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut.

1. Otoritas Pajak

Belum tercapainya target *tax ratio* di Indonesia masih menjadi fokus utama otoritas pajak. Penting untuk mengoptimalkan sosialisasi berbasis media sosial serta menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang inklusif, khususnya bagi UMKM dan wajib pajak individu yang kurang terampil secara teknologi. Lebih jauh, evaluasi berkala terhadap kebijakan tarif dan mekanisme penghitungan pajak harus dilakukan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip *ability to pay* dan keadilan pajak.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan proaktif memanfaatkan pelatihan dan sosialisasi yang disediakan otoritas pajak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan CTAS. Adaptasi terhadap sistem digital ini akan lebih mudah jika wajib pajak mengembangkan sikap optimis dan terbuka terhadap inovasi teknologi. Selain itu, kolaborasi dengan

konsultan pajak atau pihak yang lebih berpengalaman dapat membantu mengatasi kendala teknis, sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai secara lebih efisien dan akurat.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan temuan ini dengan pengujian lebih lanjut, seperti menganalisis dampak CTAS terhadap rasio pajak atau memperluas cakupan penelitian dengan studi komparatif sistem administrasi perpajakan digital di negara lain. Penelitian lebih lanjut juga diharapkan dapat mengeksplorasi faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi adopsi CTAS, termasuk peran kepercayaan dan persepsi risiko di kalangan wajib pajak. Serta memperluas kriteria informan dengan melibatkan pihak otoritas pajak guna membandingkan informasi dari beberapa pihak sehingga validitas data menjadi lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-rahamneh, N. M., Al, K., & Bidin, Z. (2023). The influence of tax transparency on sales tax evasion among Jordanian SMEs : The moderating role of moral obligation. *Cogent Business & Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2220478>
- Alam, K. (2019). A systematic qualitative case study : questions , data collection , NVivo analysis and saturation. <https://doi.org/10.1108/QROM-09-2019-1825>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges And Opportunities CoreTax Administration System On The Efficiency Of Tax Administration. 12(2).
- Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101754. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754>
- Blut, M., Wang, C., & Wang, C. (2020). Technology readiness : a meta-analysis of conceptualizations of the construct and its impact on technology usage. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 649–669. <https://doi.org/doi.org/10.1007/s11747-019-00680-8>
- Budhathoki, T., Zirar, A., Njoya, E. T., & Timsina, A. (2024). Education ChatGPT adoption and anxiety : a cross-country analysis utilising the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT). *Studies in Higher Education*, 49(5), 831–846. <https://doi.org/10.1080/03075079.2024.2333937>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Chehrehbargh, F. J., Rajabifard, A., & Atazadeh, B. (2024). Current challenges and strategic directions for land administration system modernisation in Indonesia. *Journal of Spatial Science*, 69(4), 1097–1130. <https://doi.org/10.1080/14498596.2024.2360531>
- Cloutier, C., & Ravasi, D. (2021). Using tables to enhance trustworthiness in qualitative research. *Sagepub.Com/Journals-Permissions*, X. <https://doi.org/10.1177/1476127020979329>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11, 19–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35944/jofrp.2022.11.1.002>

- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). Core tax administration system : the power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Hardika, N. S., & Arsana, I. M. M. (2024). Accountants ' perspective on tax amnesty enhances tax compliance dimensions in extended slippery slope framework. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2358161>
- Darmayasa, I. N., Othman, R. D. B., Tanggamani, V., & Hardika, N. S. (2024). *Equality Principle in Designing Taxation International Digital Transactions : A Case Study of ASEAN* (Vol. 2024). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2>
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Flavián, C., Perez-Rueda, A., Belanche, D., & Casaló, L. (2020). Intention to use analytical Artificial Intelligence in services. The effect of technology readiness and awareness. *Journal of Service Management*. <https://doi.org/10.1108/JOSM-10-2020-0378>.
- Frechette, J., Bitzas, V., Aubry, M., & Kilpatrick, K. (2020). Capturing Lived Experience : Methodological Considerations for Interpretive Phenomenological Inquiry. 19, 1–12. <https://doi.org/10.1177/1609406920907254>
- Guoqiang, M., & Chunlei, W. (2025). Tax Equity: Benefit Principle Versus Ability-to-Pay Principle BT - Dictionary of Contemporary Chinese Economics (H. Yinxing (ed.); pp. 1421–1422). *Springer Nature Singapore*. https://doi.org/10.1007/978-981-97-4036-9_657
- Hansen-Magnusson, H., Vetterlein, A., & Wiener, A. (2020). The problem of non-compliance: knowledge gaps and moments of contestation in global governance. *Journal of International Relations and Development* 23 , Pp. 636-656. <https://doi.org/doi.org/10.1057/s41268-018-0157-x>
- Hummel, K., & Szekely, M. (2022). Disclosure on the Sustainable Development Goals–Evidence from Europe. *Accounting in Europe*, 19(1), 152–189. <https://doi.org/10.1080/17449480.2021.1894347>
- Indryani, A. P., & Setyawan, N. D. (2024). Analysis of UNESA Student's Perceptions of The Implementation Of The Core Tax Administration System

(CTAS) In Indonesia In 2025. 2(2), 144–156.

Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System : Road Map to Implementation 2024. 8(06), 46–56.
<https://doi.org/doi.org/10.51505/IJEBMR.2024.8604>

Khan, M., & Majahar, B. (2024). Review on Pro and Con of Development in E-Invoicing. <https://doi.org/doi.org/10.2139/ssrn.5050254>

Langley, A., & Meziani, N. (2020). Making Interviews Meaningful. *Journal of Applied Behavioral Science*, 56(June), 370–391.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0021886320937818>

Li, W. (2021). *The Role of Trust and Risk in Citizens ' E-Government Services Adoption : A Perspective of the Extended UTAUT Model*.
<https://doi.org/doi.org/10.3390/su13147671>

López-Deflory, C. (2023). Linguistic Characteristics of Texts : Methodological Notes on a Missed Step in Critical Discourse Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22, 1–11.
<https://doi.org/10.1177/16094069231156343>

Marroquín-ciendúa, F., Medina-labrador, M., Camila, L., Méndez, H., Patricia, L., Hernández, M., Nicolás, C., Medina-labrador, M., Camila, L., Méndez, H., Patricia, L., Hernández, M., Nicolás, C., & Guzmán, P. (2025). Use of UTAUT for analyzing the acceptance and use of electric scooters in the public transport system. *Urban, Planning and Transport Research*, 13(1).
<https://doi.org/10.1080/21650020.2025.2458548>

Mavhandu-mudzusi, A. H., Moyo, I., Mthombeni, A., Ndou, A., Mamabolo, L., Ngwenya, T., & Marebane, T. (2022). WhatsApp as a Qualitative Data Collection Method in Descriptive Phenomenological Studies. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–9.
<https://doi.org/10.1177/16094069221111124>

Montanaro, E. A., Bowling, J., Gattuso, J., Gioia, D., Guerrero-ordonez, S., Joshi, S., Campbell, S., & Harrison, M. (2022). *Qualitative Analyses of Couples ' Text Messages : Methods Re fl ection*. 21, 1–8.
<https://doi.org/10.1177/16094069221115503>

Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. *The Qualitative Report*, 27(1), 64–77. <https://doi.org/doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>

Munjeyi, E., & Schutte, D. (2024). Examining the critical success factors influencing the diffusion of AI in tax administration in Botswana. *Cogent*

Social Sciences, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2419537>

Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2024). *A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research*. 22(October), 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>

Nicmanis, M. (2024). Reflexive Content Analysis : An Approach to Qualitative Data Analysis, Reduction, and Description. *International Journal of Qualitative Methods*, 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069241236603>

Nizar, A. M., & Yusuf, A. (2022). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Aplikasi Dompot Digital LinkAja*. 7(2), 928–933. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.569>

Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance : is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 4788, 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>

OECD. (2020). *Tax Administration 3.0 : The Digital Transformation of Tax Administration Tax Retail Welfare Business Other*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/doi.org/10.1787/ca274cc5-en>

OECD. (2024). *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/2d5fba9c-en>

Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>

Parasuraman, A. (2000). Technology Readiness Index (Tri): A Multiple-Item Scale to Measure Readiness to Embrace New Technologies. *Journal of Service Research*, 2(4), 307–320. <https://doi.org/10.1177/109467050024001>

Pavlova, K. S., & Knyazeva, N. V. (2022). *Artificial Intelligence Technologies in Tax Consulting and Forensic Tax Expertise BT - Digital Technologies in the New Socio-Economic Reality* (S. I. Ashmarina & V. V. Mantulenko (eds.); pp. 291–300). Springer International Publishing. https://doi.org/doi.org/10.1007/978-3-030-83175-2_38

Rahardja, U., Hapsari, I. D., Putra, P. O. H., & Nizar, A. (2023). Technological readiness and its impact on mobile payment usage : A case study of go-pay. *Cogent Engineering*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2023.2171566>

- Riaz, H., Ahmed, H., & Jibril, A. B. (2024). Reassessing customer trust and privacy concerns in omnichannel customer experience. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2410405>
- Ritsatos, T. (2014). Tax evasion and compliance; from the neo classical paradigm to behavioural economics, a review. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 10(2), 244–262. <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2012-0059>
- San, A. N. C. S., Seng, W. T., Yee, C. J., Siong, O. H., Hussain, N. C., & Khen, T. M. (2023). *Preparing SMEs for E-Invoice Adoption : Assessing Technology Readiness and Its Segmentation* (Issue Bafe). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-342-9>
- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., Queiroga, D. E. U. de, Silva, I. A. P. da, & Ferreira, S. M. S. (2018). *The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study*. 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Sentosa, N., Darmayasa, I. N., Susanti, J., Putu, N., & Lina, M. (2025). Digital Economy and Taxation : Ensuring Fairness for Source Countries. *Global Business & Finance Review*, December. <https://doi.org/10.17549/gbfr.20xx.28.7>
- Shaipah, N., Wahab, A., Ling, T. W., Abdurrahman, A. P., Keong, O. C., Herda, N., & Abdullah, N. (2021). Effects of digital economy involvement on book-tax differences in Malaysia. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1870806>
- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. New York : Modern Library, ©1994. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999820678102121>
- Swain, R. B., & Yang-Wallentin, F. (2020). Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 27(2), 96–106. <https://doi.org/10.1080/13504509.2019.1692316>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). *User Acceptance of Information Technology : Toward a Unified View*. September 2003. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Whitney, C., & Evered, J. (2025). Dimensionalizing Data : Using the in Vivo, Collaborative, Proliferative, Metaphorical, and Graphic Modes of Dimensionalization as Techniques for Qualitative Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/16094069251315396>

- Yamen, A., Coskun, A., Mersni, H., & Coskun, A. (2023). Digitalization and tax evasion: the moderation effect of corruption of corruption. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2142634>
- Yossinomita, Y., H., H., N., & S., Z. (2024). Maximizing Economic Growth in Indonesia: A Model-Based Exploration of Optimal Tax Ratios. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(2024), 87–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i2.756>
- Yu, C. (2024). Enhancing Usability and User Experience Through User Onboarding in an Ecological Information App BT - Proceedings of the Future Technologies Conference (FTC) 2024, Volume 4. In K. Arai (Ed.), *Springer, Cham* (pp. 376–389). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-73128-0_23

